



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	6
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan sampai dengan Triwulan I	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.....	19
3.1.1.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	19
3.2.2.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	21
3.2.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	25
BAB IV	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 BAPPEDA Kota Padang Panjang	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang	17
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	24
Tabel 3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	28
Tabel 3.4	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (SIPD)	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Rancangan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) program, 16 (Enam belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 BAPPEDA Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2004- 2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		PERANGKAT DARAH PENANGGU NG JAWAB
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		PENUNJANG URUSAN			72,650,169,698				6,788,688,665		1,221,803,802								1,221,803,802		1,221,803,802			
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			72,650,169,698			100.00%	6,788,688,665	27.70%	1,221,803,802							18.00%	1,221,803,802		1,221,803,802		1.68%	BAPPEDA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	15,499,169,698			100.00%	5,759,261,165		1,195,589,052								1,195,589,052		1,195,589,052		7.71%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	11,641,705,698			100.00%	4,442,640,605		1,105,311,960								1,105,311,960		1,105,311,960		9.49%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1386 orang/ bulan	11,641,705,698			462 orang/ bulan	4,442,640,605	99 orang/ bulan	1,105,311,960							99 orang/ bulan	1,105,311,960	462 orang/ bulan	1,105,311,960		9.49%	BAPPEDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan administrasi kepegawaian	100%	21,500,000			-	-									-	-		-		0.00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kepegawaian	43 Paket	21,500,000			-	-									0%	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	1,432,300,000			100%	430,792,560		39,532,117								39,532,117		39,532,117		2.76%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,300,000			4 Paket	4,100,000	-	-							-	-	-	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	202,500,000			4 Paket	50,488,560	-	-							0%	-	4 Paket	-		0.00%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67,500,000			4 Paket	15,000,000	-	-							0%	-	4 Paket	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1,150,000,000			24 Laporan	361,204,000	6 Laporan	39,532,117							6 Laporan	39,532,117	24 Laporan	39,532,117		3.44%	BAPPEDA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	670,000,000			100%	400,360,000		0								0				0.00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	540,000,000			1 Unit	350,000,000	-	-							-	-	1 Unit	-		0.00%	BAPPEDA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	50,000,000			-	-									-	-		-		0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	80,000,000			6 Unit	50,360,000	-	-							-	-	6 Unit	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	643,664,000			100%	207,750,000		35,850,995								35,850,995		35,850,995		5.57%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000			4 Laporan	3,000,000	-	-							-	-	4 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	114,000,000			-	-									0%	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	517,664,000			12 Laporan	204,750,000	3 Laporan	35,850,995							3 Laporan	35,850,995	12 Laporan	35,850,995		6.93%	BAPPEDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	1,090,000,000			100%	277,718,000		14,893,980								14,893,980		14,893,980		1.37%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	720,000,000			20 Unit	237,718,000	9 Unit	14,893,980							9 Unit	14,893,980	20 Unit	14,893,980		2.07%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	120,000,000			50 Unit	40,000,000	-	-							-	-	50 Unit	-		0.00%	BAPPEDA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	250,000,000			-	-									-	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	86%	56,331,000,000			82%	552,079,550		18,651,500								18,651,500		18,651,500		0.03%		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	3 Dokumen	55,891,000,000			4 dokumen	512,079,550		18,328,100								18,328,100		18,328,100		0.03%		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	90,000,000					-	-							-	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	190,000,000			2 Berita Acara	100,000,000	2 Berita Acara	411,600						2 Berita Acara	411,600	2 Berita Acara	411,600		411,600		0.22%	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 Dokumen	55,611,000,000			6 Dokumen	412,079,550	1 Dokumen	17,916,500						1 Dokumen	17,916,500	6 Dokumen	17,916,500		17,916,500		0.03%	BAPPEDA
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	88%	50,000,000			86%	10,000,000	-	323,400								323,400		323,400		0.65%		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	10,000,000	-	323,400							-	323,400	1 Dokumen	323,400		0.65%	BAPPEDA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	12 Dokumen	50,000,000			4 Dokumen	15,000,000	-	-							-	-		-		0.00%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	30 Laporan	50,000,000			10 Laporan	15,000,000	-	-							0.00%	-	10 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	15 modul	340,000,000			5 Modul	15,000,000	-	-							-	-		-		0.00%	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	123 Dokumen	340,000,000			41 Dokumen	15,000,000	-	-							0.00%	-	41 Dokumen	-		0.00%	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	92%	450,000,000			88%	159,847,950		1,023,750								1,023,750		1,023,750		0.23%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92%	210,000,000			88%	75,000,000		1,023,750								1,023,750		1,023,750		0.49%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan	90,000,000			13 Laporan	35,000,000	-	-							0%	-	13 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan	120,000,000			13 Laporan	40,000,000	-	1,023,750							-	1,023,750	13 Laporan	1,023,750		0.85%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	92%	150,000,000			88%	50,000,000	-	-							-	-		-		0.00%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	150,000,000			2 Laporan	50,000,000	-	-					-	-	1 laporan	-		-		100.00%	BAPPEDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	92%	90,000,000			88%	34,847,950	-	-							-	-		-		0.00%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	24 Laporan	90,000,000			8 Laporan	34,847,950	-	-					-	-	8 Laporan	-		-		0.00%	BAPPEDA
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan; Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kemampuan di atas 90	24 Dokumen; 76%	370,000,000			6 Dokumen; 72%	317,500,000		6,539,500							6,539,500		6,539,500			1.77%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	3 Dokume n	65,000,000			-	-									0		-			0.00%	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	65,000,000			-	-							-	-	-	-		-		0.00%	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	22,500,000	-	-							0		-			0.00%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	22,500,000	-	-							-	-			-	0.00%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	Jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	215,000,000	-	-												0.00%	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	215,000,000	-	-							-	-			-	0.00%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	180,000,000			100%	80,000,000	-	6,539,500								6,539,500		6,539,500		3.63%	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	180,000,000			1 Dokumen	80,000,000	-	6,539,500							-	6,539,500	1 Dokumen	6,539,500		3.63%	BAPPEDA
		JUMLAH TOTAL			72,650,169,698				6,788,688,665		1,221,803,802								1,221,803,802		1,221,803,802		1.68%	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk realisasi keuangan 24,88% dan fisik 32%.
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 26%. (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 15%. (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 20%. (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi keuangan 10,94% dan fisik 18%.
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi keuangan 0% dan fisik 26%, rencananya pengadaan kendaraan dinas di awal tahun namun sub kegiatan tersebut masuk refofusing anggaran. (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan 0% dan fisik 17%. (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 17,51% dan fisik 31%.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%. (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 36%. Pemeliharaan ini dibayarkan sesuai kebutuhan jika ada pemeliharaan kendaraan maupun peralatan dan mesin.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
(1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%, selanjutnya sub kegiatan ini berisi pembekalan fasilitator musrenbang pada akhir tahun. (3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 4,35% dan fisik 36% karena kegiatan masih sedang berlangsung untuk penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 6,23% dan fisik 6%.
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 10%.
 - d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 70%.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 0% dan fisik 30%. (2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 2,56% dan fisik 10%.
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, realisasi keuangan 0% dan fisik 12%.

- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, realisasi keuangan 0% dan fisik 7%.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri atas kegiatan :
- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, dengan sub kegiatan (1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Sub kegiatan akan dihilangkan di refofusing anggaran.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, realisasi keuangan 0% dan fisik 1%. Sub kegiatan akan dihilangkan di refofusing anggaran.
 - c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, realisasi keuangan 8,17% dan fisik 33%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 (Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2018-2023) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah***
2. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan***
3. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting***

Sedangkan untuk tahun 2024 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan***
2. ***Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah***

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah				73%	68,75%	94,18%	72%	69,71%	95,49%
2.	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan				96,37%	100%	103,77%	95%	96,37%	101,44%
3.	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting				100%	100%	100%	91,7%	100%	109.05%
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	70,00	72,20	103,14%						
5.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%						

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan disadari bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, baik perencanaan skala kota, maupun perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun selama tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator perencanaan pembangunan ini belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih belum terukurnya kualitas perencanaan	Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih beragamnya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah masih belum optimal	Rendahnya konsistensi Indikator dokumen perencanaan
			Rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Perencanaan dan penganggaran masih belum berdasarkan analisis kebutuhan
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih rendahnya tatakelola data dan pemanfaatan sistem informasi
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan
2.	Masih kurangnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Masih rendahnya Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan
			Rendahnya pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: ***“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Baseline (2024)	Target Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan Daerah	72,20	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
			Indeks Inovasi Daerah	81,35 (Sangat Inovatif)	82,22 (Sangat Inovatif)	82,81 (Sangat Inovatif)	84,41 (Sangat Inovatif)	86,00 (Sangat Inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat Inovatif)	
			Nilai AKIP Kota	64,22	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80,00	
		1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	22,93	23,00	23,05	23,10	23,15	23,20	23,25	
		2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	78%	79%	80%	81%	82%	83%	
		3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,40	70,60	70,80	71,00	71,20	71,40	71,60	

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Penetapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode transisi tahun 2024-2026, serta Evaluasi Renstra dan Renja Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Tahun 2024.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Tahun 2025 awal yang meliputi 4 (Empat) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 4. Impelementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
 - 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025		Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025				Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026			
						Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025		Nasional	Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6,643,996,059	6,788,688,665	5,687,490,300	5,351,515,549							37,055,874,947
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01			PERENCANAAN				6,518,996,059	6,471,188,665	5,629,800,340	5,247,917,999							4,825,874,947
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 Persen	100 Persen	5,723,607,869	5,759,261,165	5,188,648,490	4,916,245,499						100 Persen	4,825,874,947
5	01	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4,320,901,309	4,442,640,605	4,442,640,605	4,155,960,264						100 Persen	4,329,930,419
5	01	01	2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	4,320,901,309	4,442,640,605	4,442,640,605	4,155,960,264	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	462 Orang/bulan	4,329,930,419
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	419,588,560	430,792,560	220,023,685	231,040,435						100 Persen	184,000,000
5	01	01	2.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4,100,000	4,100,000	3,091,800	3,091,800	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Paket	4,000,000
5	01	01	2.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50,488,560	50,488,560	28,833,885	28,833,885	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Paket	23,000,000

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		
						Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
5	01	01	2.0	0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15,000,000	15,000,000	7,500,000	18,516,750	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Paket	7,000,000
5	01	01	2.0	0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	350,000,000	361,204,000	180,598,000	180,598,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	24 Laporan	150,000,000
5	01	01	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	350,000,000	400,360,000	50,360,000	91,420,600						100 Persen	-
5	01	01	2.0	0702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	350,000,000	350,000,000	-	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	0 paket	-
5	01	01	2.0	0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	50,000,000	50,360,000	50,360,000	91,420,600	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	0 paket	-
5	01	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	305,400,000	207,750,000	206,168,600	187,648,600						100 Persen	157,475,779
5	01	01	2.0	0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000	3,000,000	1,495,800	2,495,800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Laporan	2,000,000
5	01	01	2.0	0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	302,400,000	204,750,000	204,672,800	185,152,800	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	12 Laporan	155,475,779

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025				Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026			
						Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025		Nasional	Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	277,718,000	277,718,000	269,455,600	250,175,600						100 Persen	154,468,749
5	01	01	2.0 9 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	237,718,000	237,718,000	229,485,600	210,205,600	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	20 Unit	134,468,749
5	01	01	2.0 9 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	40,000,000	40,000,000	39,970,000	39,970,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	50 Unit	20,000,000
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84 Persen	84 Persen	620,540,240	552,079,550	306,303,900	250,691,900						84 Persen	32,025,000,000
5	01	02	2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 dokumen	4 dokumen	565,540,240	512,079,550	266,303,900	250,691,900						2 dokumen	32,000,000,000
5	01	02	2.0 1 0 0 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	-	35,000,000	-	-	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD	1 Dokumen	-
5	01	02	2.0 1 0 0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,000,000	100,000,000	64,999,850	49,387,850	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD	2 Berita Acara	50,000,000
5	01	02	2.0 1 0 0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	430,540,240	412,079,550	201,304,050	201,304,050	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD	6 Dokumen	31,950,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
			Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
501022.0	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87 Persen	87 Persen	15,000,000	10,000,000	10,000,000	-						87 Persen	5,000,000
501022.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	10,000,000	10,000,000	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Data Perencanaan	1 Dokumen	5,000,000
501022.003	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	4 dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-						4 dokumen	10,000,000
501022.003003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Evaluasi Dokumen Perencanaan	10 Laporan	10,000,000
501022.004	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	5 modul	25,000,000	15,000,000	15,000,000	-						5 modul	10,000,000
501022.004001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	41 Dokumen	25,000,000	15,000,000	15,000,000	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Data pada aplikasi perencanaan	41 Dokumen	10,000,000
50103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 Persen	88 Persen	174,847,950	159,847,950	134,847,950	80,980,600						88 Persen	105,000,000
501032.001	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88 Persen	88 Persen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	44,782,650						88 Persen	60,000,000

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025				Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026			
						Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025		Nasional	Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	01	03	2.0	0Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	19,618,650	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	dokumen perencanaan bidang pemerintahan	13 Laporan	30,000,000
5	01	03	2.0	0Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	25,164,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	dokumen perencanaan bidang pemerintahan	13 Laporan	30,000,000
5	01	03	2.0	2Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	88 Persen	88 Persen	49,847,950	34,847,950	24,847,950	24,847,950						88 Persen	15,000,000
5	01	03	2.0	0Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	8 Laporan	49,847,950	34,847,950	24,847,950	24,847,950	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	dokumen perencanaan bidang perekonomian	8 Laporan	15,000,000
5	01	03	2.0	3Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88 Persen	88 Persen	50,000,000	50,000,000	35,000,000	11,350,000						88 Persen	30,000,000
5	01	03	2.0	3Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	35,000,000	11,350,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	dokumen perencanaan dibawah bidang Infrastruktur dan kewilayah an	2 Laporan	30,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPDP 2025	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
			Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan (Recofusing II)	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	05														100,000,000
5	05	02												8 Dokumen	100,000,000
														74 Persen	
5	05	02	2.0											1 dokumen	-
5	05	02	2.0	1										1 Laporan	-
5	05	02	2.0	0										1 Dokumen	15,000,000
5	05	02	2.0	0										1 Dokumen	15,000,000
5	05	02	2.0	0										1 Dokumen	15,000,000
5	05	02	2.0	0										100 Persen	70,000,000
5	05	02	2.0	0										1 Dokumen	70,000,000

Tabel 3.4

**Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025 (SIPD)**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							6,643,996,059.00	6,788,688,665.00	5,351,515,549.38	-1,292,480,509.62							6,442,068,566.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN							6,643,996,059.00	6,788,688,665.00	5,351,515,549.38	-1,292,480,509.62							6,442,068,566.00	
	5.01	PERENCANAAN							6,518,996,059.00	6,471,188,665.00	5,248,816,589.38	-1,270,179,469.62							6,317,068,566.00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah				100 %	100 %	5,723,607,869.00	5,759,261,165.00	4,917,144,089.38	-382,339,303.00							5,341,268,566.00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	4,320,901,309.00	4,442,640,605.00	4,155,960,264.00	-164,941,045.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		3,902,068,566.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ bulan	462 Orang/ bulan	4,320,901,309.00	4,442,640,605.00	4,155,960,264.00	-164,941,045.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		3,902,068,566.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	419,588,560.00	430,792,560.00	231,040,435.00	-188,548,125.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		554,200,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,100,000.00	4,100,000.00	3,091,800.00	-1,008,200.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		4,200,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50,488,560.00	50,488,560.00	28,833,885.00	-21,654,675.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	18,516,750.00	3,516,750.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	350,000,000.00	361,204,000.00	180,598,000.00	-169,402,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	400,000,000.00	400,360,000.00	92,319,190.38	-307,680,809.62			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		330,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	-350,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			270,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50,000,000.00	50,360,000.00	92,319,190.38	42,319,190.38	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305,400,000.00	207,750,000.00	187,648,600.00	-117,751,400.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		227,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	2,495,800.00	-504,200.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			39,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	302,400,000.00	204,750,000.00	185,152,800.00	-117,247,200.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			185,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik				100 %	100 %	277,718,000.00	277,718,000.00	250,175,600.00	-27,542,400.00			-	-	-		328,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					20 Unit	20 Unit	237,718,000.00	237,718,000.00	210,205,600.00	-27,512,400.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	50 Unit	40,000,000.00	40,000,000.00	39,970,000.00	-30,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD				84 %	84 85 % %	620,540,240.00	552,079,550.00	250,691,900.00	195,259,760.00							815,800,000.00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan				4 dokumen	4 dokumen	565,540,240.00	512,079,550.00	250,691,900.00	-314,848,340.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah		665,800,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	35,000,000.00	0.00	0.00	-35,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,000,000.00	100,000,000.00	49,387,850.00	-50,612,150.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	430,540,240.00	412,079,550.00	201,304,050.00	-229,236,190.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			560,800,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data				87 %	87 %	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-15,000,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		15,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		15,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				4 dokumen	4 dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		15,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		15,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan				5 modul	5 modul	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	-25,000,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		120,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				41 Dokumen	41 Dokumen	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		120,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik				88 %	80 88 % %	174,847,950.00	159,847,950.00	80,980,600.00	-14,847,950.00							160,000,000.00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				88 %	88 %	75,000,000.00	75,000,000.00	44,782,650.00	-30,217,350.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		75,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	13 Laporan	35,000,000.00	35,000,000.00	19,618,650.00	-15,381,350.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	13 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	25,164,000.00	-14,836,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA				88 %	88 %	49,847,950.00	34,847,950.00	24,847,950.00	-25,000,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		35,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				8 Laporan	8 Laporan	49,847,950.00	34,847,950.00	24,847,950.00	-25,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan				88 %	88 %	50,000,000.00	50,000,000.00	11,350,000.00	-38,650,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		50,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	11,350,000.00	-38,650,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							125,000,000.00	317,500,000.00	102,698,960.00	-22,301,040.00							125,000,000.00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan				74 8 % Dokumen	74 75 8 % Dokumen	125,000,000.00	317,500,000.00	102,698,960.00	0.00							125,000,000.00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	0 Laporan	15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	-22,500,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	0 Dokumen	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	-22,500,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	22,500,000.00	215,000,000.00	0.00	-22,500,000.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	22,500,000.00	215,000,000.00	0.00	-22,500,000.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah				100 %	100 %	65,000,000.00	80,000,000.00	102,698,960.00	37,698,960.00			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		65,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000.00	80,000,000.00	102,698,960.00	37,698,960.00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			65,000,000.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			J U M L A H						6,643,996,059.00	6,788,688,665.00	5,351,515,549.38	18,333,339,273.00							6,442,068,566.00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang akan melaksanakan 4 (Empat) program 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

The image shows a circular official stamp of the Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. The stamp is purple and contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG' around the perimeter and 'BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19721016 199303 2 001